

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

- Mata pelajaran** : Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kelas/Semester : X / Ganjil
Pembuat RPP : Mujiono,S.Pd.,MM
Email : mujixsn@gmail.com
Alokasi Waktu : 10 menit
Kopetensi Inti : 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
: 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
: 3 Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
: 4 Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu danMenunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
- Kopetensi Dasar** : 3.6 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

I Tujuan Pembelajaran

Melalui penjelasan guru, tanya jawab dan diskusi kelompok diharapkan siswa dapat Menganalisis tugas dan wewenang MPR menurut Undang - undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dengan benar.

II Indikator Hasil Pembelajaran

Menganalisis tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

III Materi Pembelajaran

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 amandemen, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
2. Melantik presiden dan wakil presiden.
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden
5. Memilih wakil presiden

IV Kegiatan Pembelajaran

1. Guru mengabsen dan memimpin siswa untuk berdoa menurut agama dan Kepercayaannya.
2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang Struktur lembaga - lembaga negara menurut Undang - undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
3. Siswa membentuk kelompok dan dilanjutkan untuk berdiskusi tentang tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 amandemen.
4. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok.
5. Siswa bersama - sama guru menyimpulkan tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 amandemen.
6. Siswa mengerjakan Soal penilaian.

V Metode / strategi

1. Ceramah bervariasi
2. Tanya Jawab
3. Kerja kelompok

VI Sumber belajar

1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X penerbit Erlangga
2. Buku naskah UUD 1945 yang telah diamandemen
3. Internet <https://brainly.co.id/tugas/817890>

VII Penilaian

- Bentuk Tes : tertulis
Bentuk Soal : esai
Soal : terlampir

Banyuasin, 17 Pebruari 2021
Calon Fasilitator



MUJIONO,S.Pd.,MM
NIP 197009051993081002

Lampiran : 1

LEMBAR KERJA SISWA

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kelas/Semester : X / Ganjil

Kerjakanlah dengan kelompok kalian !

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 amandemen	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Nama Kelompok :
Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.....
2.....
3.....
4.....

**KUNCI JAWABAN
LEMBAR KERJA SISWA**

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 amandemen	1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden 5. Memilih wakil presiden
---	---

SOAL PENILAIAN

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kelas/Semester : X / Ganjil

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Jika Undang - Undang Dasar di pandang sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan di Indonesi MPR mempunyai tugas dan wewenang untuk mengubah Undang - undang Dasar. Tuliskan mekanisme MPR untuk mengubah Undang - Undang Dasar !
2. Pada suatu ketika presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya lagi sebagai presiden sehingga terjadi kekosongan presiden. Apa yang harus dilakukan MPR untuk mengisi kokosongan presiden ?
3. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden. Bila wakil presiden berhalangan tetap jelaskan cara MPR untuk memilih wakil presiden !

.....Selamat Bekerja

LEMBAR JAWABAN

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kelas/Semester : X / Ganjil

1.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NILAI	TANDA TANGAN GURU	TANDA TANGAN ORANG TUA

Catatan Guru :
.....
.....
.....

**KUNCI JAWABAN
LEMBAR PENILAIAN**

1. Jika Undang - Undang Dasar di pandang sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan di Indonesi MPR maka MPR mempunyai wewenang untuk mengubah Undang - Undang Dasar dengan mekanisme sebagai berikut ;
 - a. Usulan perubahan pasal UUD 1945 diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
 - b. Setiap usul perubahan diajukan tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.
 - c. Sidang paripurna MPR dapat memutuskan perubahan pasal UUD 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah anggota ditambah satu anggota.
2. Apabila terjadi kekosongan jabatan presiden, maka MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik wakil presiden menjadi presiden
3. Jika terjadi kekosongan wakil presiden maka;
 - a. MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari.
 - b. MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden